

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang hukum, meliputi penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, serta meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum ke arah tegaknya hukum, ketertiban, dan kepastian hukum.

Hukum di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, baik di mata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Masyarakat melihat dan menilai sistem hukum di negeri kita sangat lemah. Salah satu yang dianggap lemah adalah dalam permasalahan perlindungan saksi. Saksi di Indonesia kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi dapat dengan mudah dipengaruhi, diteror, bahkan mungkin dibunuh agar tidak dapat bersaksi guna mengungkap suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkoba.

Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal yang sama dirasakan di Indonesia dimana hampir setiap hari peredaran narkoba dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkoba hingga berita generasi muda yang tewas karena mengkonsumsi narkoba, tiada henti-hentinya diberitakan di media cetak maupun media elektronik.

Terungkapnya pabrik-pabrik narkoba di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai konsumen narkoba, tetapi sudah sebagai produsen narkoba. Menurut Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Nugroho Aji, berdasarkan data, jumlah pengguna narkoba di Jakarta mencapai 280.000 jiwa kepada VIVAnews.com.¹

Memperhatikan hal-hal di atas tampaknya besar kemungkinan, bahwa para bandar narkoba yang beroperasi di negara kita merupakan kepanjangan dan binaan dari jaringan organisasi-organisasi kejahatan Internasional. Sebagaimana diakui oleh beberapa pejabat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bahwa salah satu sebab kejahatan yang bertalian dengan peredaran narkoba ini agak sulit diberantas, karena kejahatan ini memiliki jaringan internasional yang bersifat tertutup dan eksklusif.² Dengan demikian, setiap gangguan keamanan, utamanya yang merupakan suatu tindak pidana, harus ditanggulangi dengan sekuat tenaga dan sedini mungkin.

¹ [Http://Metro.Vivanews.Com/News/Read/260702-Pelajar-Masuk-Urutan-Ke-4-Pengguna-Narkoba](http://Metro.Vivanews.Com/News/Read/260702-Pelajar-Masuk-Urutan-Ke-4-Pengguna-Narkoba), diunduh 5 November 2011 pukul 16.00 wib

² O.C Kaligis, 2002, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 273

Berbagai tindakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yang timbul dalam masyarakat, yaitu dengan cara :³

1. *pre-emptive* adalah pencegahan secara dini atau lebih awal, belum ada tanda-tanda kriminogen (faktor pencetus tindak criminal);
2. Tindakan *preventif* adalah tindakan sebelum terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum;
3. Tindakan *represif* adalah tindakan ini dimulai dari suatu adanya pelanggaran sampai pada suatu proses pengusutan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana yakni menjerat pelaku dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Berdasarkan fakta yang ada, aparat penegak hukum hanya mampu menjebloskan pelaku yang sifatnya hanya “pemain kecil”, yakni pengedar pengedar yang sifatnya hanya menyalurkan narkoba tersebut, itupun dengan barang bukti yang hanya sedikit, tetapi tidak mampu untuk menjerat tokoh di balik jaringan besar ini. Hal ini di dasarkan dengan semakin meningkatnya kejahatan ini.⁴

Di dalam mengungkap dan menemukan kejelasan tentang perkara pidana narkoba ini, aparat tidak hanya memperoleh informasi dari pelaku sindikat yang tertangkap. Tetapi peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan

³ Wresniworo, 2002, *Masalah Narkoba dan Obat-obatan Berbahaya*, Jakarta: Mitra Bintimar hlm 33

⁴ Daan Sabadah dan Kunarto, 1999, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 302.

narkotika diharapkan sangat besar kontribusinya, mengingat jumlah personel aparat sendiri sangat minim sekali jika harus mengawasi peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.

Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya tidak senang dan marah saja, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi saksi yang diketahuinya.⁵

Berdasarkan tindakan-tindakan yang akan mengancam keselamatan saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta saksi, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaik-baiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman maupun intimidasi

⁵Gatot Supranomo, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm 102

dari sindikat narkoba. Seperti dikatakan Leden Marpaung bahwa, “Keterangan saksi diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun”.⁶

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seorang saksi, maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan hal-hal di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS NARKOTIKA” (Studi Kasus di Polresta Surakarta)**.

⁶ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penangaan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 81.

A. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar objek penelitian tidak menjadi bias, maka perlu diberikan pembatasan masalah. Permasalahan difokuskan pada Perlindungan saksi dalam perkara narkoba, khususnya di Polresta Surakarta.

Setelah mengetahui dan memahami uraian dan latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah untuk dikaji lebih dalam lagi. Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui praktek perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 1. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti;

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan saksi terhadap perkara tindak pidana narkoba untuk mengawal penegakan hukum ke arah yang lebih baik.

3. Manfaat Praktis:

1. Memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya;
2. Memberikan rekomendasi pada Fakultas Hukum UMS agar perlindungan terhadap saksi dalam perkara narkoba dapat dimasukkan pada mata kuliah perlindungan saksi dan korban, mengingat kemahiran praktik hukum (*legal practice*) sangat dibutuhkan dalam menangani kasus konkrit yang ada dalam masyarakat;
3. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama melakukan studi di Fakultas Hukum UMS;
4. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

C. Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Perlindungan hukum terhadap saksi melalui instrumen hukum administrasi ditujukan untuk mengatur bagaimana aparat penegak hukum (khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, hakim (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan) harus bertindak atau mengambil langkah dalam ranah administratif terhadap saksi. Pendekatan dalam perspektif ini diperlukan, karena bekerjanya aparat penegak hukum pidana (*Official Criminal Justice System*) diatur dalam *rule of conduct* yang tidak hanya bersanksi pidana, tetapi juga ada yang bersanksi administrasi. Sebagai ilustrasi, apabila ada pejabat penyidik atau jaksa yang melakukan “kesalahan/kekeliruan” dalam melakukan tugas kewenangannya, maka ia akan diperiksa oleh Komisi Kepolisian atau Komisi Kejaksaan atau oleh pejabat atasannya dan dapat dikenakan sanksi administrasi, disamping kalau memang memenuhi rumusan delik atau perbuatannya merupakan tindak pidana, dapat diajukan proses hukum pidana.⁷

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “*segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh suatu lembaga tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang*”.

⁷ Muchamad Iksan, 2009. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 117.

Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain dan apabila terjadinya tindak pidana akan adanya sanksi sesuai ketentuan undang-undang.⁸

2. Proses Peradilan Pidana Narkotika

Proses hukum kasus pidana narkotika meliputi pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan pengadilan. Proses pertama bisa diawali dengan laporan atau pengaduan ke kepolisian. Yang bisa melapor adalah: korban (terutama untuk delik aduan), saksi, dan/ atau siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindakan kejahatan narkotika.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP, "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang*".

⁸ Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm 10

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam suatu Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”. Suatu tindak pidana dapat diketahui oleh aparat yang berwenang, yakni polisi berdasarkan 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut:⁹

1. Pasal 1 angka 19 KUHAP, yakni tertangkap tangan
2. Pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni karena laporan
3. Pasal 1 angka 25 KUHAP, karena pengaduan.
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar radio atau orang bercerita dan seterusnya.

Dalam penyidikan, diperlukan kerjasama dari anggota masyarakat yang diminta sebagai saksi. Seringkali karena tidak terbiasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, warga yang diminta menjadi saksi memerlukan pendampingan dari para legal selama proses penyidikan berlangsung. Oleh karena itu jika di antara masyarakat tersebut menghadapi ancaman dari pelaku tindak pidana, maka secara tidak langsung akan menghambat penegakan hukum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membaca dengan tekun dan teliti untuk merumuskan dokumen tuntutan untuk dilimpahkan ke

⁹ *Ibid*, hlm 60

Pengadilan Negeri yang berwenang. Lalu jaksa akan meminta Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

Dalam persidangan diperlukan pemantauan dari warga bersama para legal baik bila warga masyarakat menjadi korban maupun bila dituduh sebagai tersangka. Bila semua pihak setuju dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Semua putusan hakim wajib ditulis dan bisa diakses oleh para pihak dan masyarakat umum. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Eksekusi akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding. Untuk meminta banding/kasasi diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat. Untuk itu sebaiknya minta nasihat dari pengacara bila ingin mengajukan banding atau kasasi.

3. Saksi dalam Perkara Pidana Narkotika

Terungkapnya suatu tindak pidana salah satunya tidak jarang melibatkan masyarakat yang melaporkan, tentang adanya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dengan adanya laporan tersebut aparat yang berwenang kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka persidangan.

Secara umum saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan proses peradilan tentang suatu perkara pidana

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Terkait dengan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka persidangan, seorang hakim dalam mengambil putusannya memerlukan suatu alat bukti antara lain adalah keterangan saksi.

M.Yahya Harahap mengartikan kesaksian berdasarkan apa yang didengar sendiri oleh saksi sebagai keterangan yang bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Harus secara langsung didengar sendiri oleh saksi terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan. Sementara kesaksian yang berdasarkan pada apa yang dilihat sendiri oleh saksi diartikan sebagai saksi yang melihat suatu tindak pidana dengan mata kepala sendiri baik sebagian maupun secara keseluruhan. Sementara itu kesaksian yang berdasarkan pada apa yang dialami sendiri oleh saksi diartikan sebagai saksi yang sekaligus menjadi korban dari suatu tindak pidana, terutama dalam bentuk-bentuk tindak pidana seperti perkosaan maupun penganiayaan, korban yang dapat dijadikan saksi utama dari tindak pidana yang bersangkutan.¹⁰

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan “*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang - orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian–pengecualian untuk menjadi saksi.

¹⁰ M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 hlm. 141-142

Pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam Pasal - pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Meskipun ada pengecualian-pengecualian tetapi sebenarnya menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang - undang yang berlaku penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi, namun demikian agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa maka di bagi 3 (tiga) golongan pengecualian menurut Pasal 168 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas;
2. Saudara dari terdakwa;
3. Suami atau istri dari terdakwa;

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu wewenang penyidik adalah menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang dimaksud dengan laporan adalah *“Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan*

undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Secara umum pada tingkat pemeriksaan di muka pengadilan, perlindungan hukum bagi saksi diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa, hakim wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Berdasarkan Pasal 166 KUHAP, Pertanyaan yang diajukan kepada saksi juga tidak boleh bersifat menjerat.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 166, pertanyaan menjerat adalah jika dalam salah satu pernyataan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan oleh saksi. Dalam hal ini artinya bahwa saksi mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan saksi adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh suatu lembaga tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak

langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban akan merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu :

¹¹“*Penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana narkoba, baik dalam perundang-undangan maupun dalam penjelasannya*”.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yang berupa penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literature yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan semua bentuk tulisan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, termasuk berita-berita dari media cetak maupun elektronik serta data dari internet dan praktik perlindungan saksi di Polresta Surakarta. Jenis Data

3. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.23.

1. Data Primer adalah praktik perlindungan saksi tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta Data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, makalah-makalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini dilakukan di daerah Kota Surakarta

3. Alat Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan objek penelitian dilakukan dengan cara :

1. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, makalah-makalah, karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian;
2. Metode Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan responden.
3. Metode Analisis Data
4. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data yang ada akan digambarkan sesuai dengan fakta di

lapangan yang nantinya dianalisis dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

Bab pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka, yang mencakup di dalamnya tinjauan umum tentang tahap-tahap penyelesaian perkara pidana, alat bukti dan system pembuktian, saksi tindak pidana narkoba.

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang perlindungan hukum bagi saksi terhadap tindak pidana narkoba

Bab penutup, dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.